

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya pembangunan kesehatan dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) 2005-2025, pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan pada upaya pencegahan (*preventif*), dan peningkatan kesehatan (*promotif*) bagi segenap warga negara Indonesia, tanpa mengabaikan upaya penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) (Depkes, 2009).

Puskesmas merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan strata pertama dalam melaksanakan upaya kesehatan tersebut, terutama upaya *preventif* dan *promotif*, namun juga tidak meninggalkan upaya *kuratif* dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/kelurahan atau dusun/rukun warga (Depkes, 2010).

Sebagai pelayanan kesehatan dasar di kecamatan, tentunya Puskesmas harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan mutu dan kualitas obat. Salah satu diantaranya adalah dalam hal penyimpanan obat. Penyimpanan obat pada puskesmas merupakan suatu rangkaian kegiatan dari pengelolaan obat yang meliputi, perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi,

pengendalian penggunaan serta pencatatan dan pelaporan. Kegiatan ini saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga diperlukan suatu sistem yang terorganisir, agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan saling mendukung. Pengelolaan obat merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Pengelolaan obat adalah suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan/seleksi pengadaan, distribusi, dan penggunaan obat dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada (Depkes,2009).

Berdasarkan Kepmenkes tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) No. 1457/2003 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota diikuti dengan Draft Revisi SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota terdiri dari 8 jenis pelayanan dan 28 indikator salah satu diantaranya adalah pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Obat merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pelayanan kesehatan, mulai dari upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan pemulihan. Oleh karena itu penyimpanan obat harus terjamin mutu dan keamanannya, terhindar dari kerusakan fisik dan kimia. Sistem penyimpanan harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi mutu obat dan mutu pelayanan. Penyimpanan menjadi hal yang sangat penting dalam ketersediaan obat dan kualitas obat itu sendiri, apabila penyimpanan dilakukan dengan tidak sesuai dapat mempengaruhi keadaan obat itu sendiri yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan obat (Depdagri, 2004).

Melihat pentingnya pelaksanaan manajemen logistik yang baik untuk menunjang pelayanan kesehatan pada masyarakat, mendorong peneliti untuk melakukan evaluasi tentang penyimpanan obat dan alat kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliningsih (2001) mengenai sistem pengelolaan perbekalan obat/alat kesehatan persediaan ruangan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita menyebutkan bahwa ketidakterediaan obat/alkes persediaan ruangan tergantung pada sistem pengelolaan yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur manajemen yaitu kebijakan pelayanan, organisasi, SDM, sarana/prasarana, metode dan sistem informasi, serta aspek logistik yang meliputi proses

perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengawasan/pengendalian.

Penelitian tentang pengelolaan obat yang dilakukan di Puskesmas Mandai Kabupaten Maros oleh Al-Hijrah (2013), menyimpulkan bahwa pengelolaan obat yang terkait perencanaan dan pendistribusian obat sudah memenuhi standar pengelolaan obat di Puskesmas. Tetapi pengadaan dan penyimpanan obat yang kurang baik dan tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan obat yang ada. Dari hasil penelitian ini maka dapat disarankan agar pengadaan dan penyimpanan obat di Puskesmas Mandai Kabupaten Maros hendaknya mengacu kepada pedoman pengelolaan obat yang ada serta mempertahankan perencanaan dan pendistribusian obat yang sesuai dengan pedoman pengelolaan obat.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kalterina (2002) yang menyebutkan bahwa perencanaan obat dan alat kesehatan kebutuhan dasar ruangan pada instalasi rumah sakit tidak akurat yang disebabkan adanya hambatan yang terjadi pada SDM, organisasi, kebijakan, prosedur, laporan pemakaian obat dan alat kesehatan, penentuan perencanaan jumlah obat dan alat kesehatan dasar ruangan. Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa permasalahan manajemen logistik khususnya obat dan alat kesehatan merupakan masalah yang kompleks dan saling terkait antar fungsi-fungsinya. Perencanaan dan pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu pada masyarakat (Nefriyanti, 2010).

Penyimpanan obat merupakan mata rantai yang penting dalam proses pengelolaan obat. Upaya-upaya yang dilakukan pada seluruh rangkaian pengelolaan obat akan sia-sia apabila penyimpanan obat tidak dilakukan dengan baik. Puskesmas dengan segala keterbatasannya seringkali terfokus hanya pada fungsi-fungsi tertentu. Salah satu fungsi yang kurang diperhatikan oleh puskesmas yaitu fungsi penyimpanan obat. Agar dapat mengelola obat dengan baik khususnya dalam penyimpanan obat, diperlukan tenaga farmasi yang memiliki pengalaman dan wawasan untuk dapat menjalankan tugasnya. Proses pengelolaan obat yang baik perlu didukung sumber daya manusia yang mengerti tentang obat sehingga menghasilkan pelayanan farmasi yang ideal (Nefriyanti, 2010).

Hasil pengamatan awal di Puskesmas Kota Gorontalo menunjukkan bahwa penyimpanan obat masih perlu ada peningkatan dan pengawasan. Masalah penyimpanan obat serta penumpukan barang di gudang adalah salah satu masalah yang ditemukan di Puskesmas Wongkaditi dan Sibatana Kota Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah tenaga farmasi dan tenaga teknis farmasi di Puskesmas Wongkaditi dan Sibatana Kota Gorontalo juga mempengaruhi terhadap Praktek kefarmasiaan, karena seharusnya bidang tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang tentang kesehatan No. 36 : 2009).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengevaluasi penyimpanan obat di Puskesmas Wongkaditi dan Sibatana Kota Gorontalo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apa perbedaan penyimpanan obat di Puskesmas Wongkaditi dan Sibatana Kota Gorontalo tahun 2015?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan umum**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan penyimpanan obat di Puskesmas Wongkaditi dan Sibatana Kota Gorontalo Tahun 2015.

### **1.3.2 Tujuan khusus**

Tujuan khusus penelitian ini yaitu

1. Mengetahui sistem penyimpanan obat di Puskesmas Wongkaditi dan Sibatana Kota Gorontalo.
2. Menggambarkan perbedaan sistem penyimpanan obat dengan variabel SDM, prosedur pelayanan serta sarana dan prasarana di Puskesmas Wongkaditi dan Sibatana Kota Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat teoritis :**

1. Dapat menjadi suatu evaluasi penyimpanan obat di unit pelayanan kesehatan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan acuan bagi peneliti lain dalam

upaya memperbaiki pelayanan penyimpanan obat.

1.4.2 Manfaat praktis :

1. Bagi pelayanan obat, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan obat khususnya penyimpanan obat di puskesmas.
2. Bagi pemegang kebijakan obat/dinas kesehatan, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan pelayanan penyimpanan obat.
3. Bagi puskesmas, penelitian ini dapat meningkatkan pengelolaan penyimpanan obat di puskesmas.